

ANALISA FAKTOR DETERMINAN INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Donny Teguh Santoso Junias¹, Raden Setyo Budi Suharto²

Abstrak :

Era otonomi daerah dapat dimanfaatkan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, salah satunya adalah sektor pariwisata yang dapat berimplikasi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor determinan keberhasilan industri pariwisata serta dapat dijadikan dasar pengembangan model pemberdayaan dan penguatan potensi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi salah satu pintu gerbang industri pariwisata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dan model penelitian menggunakan regresi linier berganda.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak sebagai aspek ekonomi pemerintah memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimana Pendapatan Pajak mampu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan sebagai aspek sosial dan Kantor Pos sebagai aspek komunikasi belum berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikarenakan sektor pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat mayoritas masih berada pada sektor informal seperti pertanian dan perkebunan rakyat, perikanan, serta peternakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri/keluarga, dan juga bahwa jumlah kantor pos yang ada belum digunakan secara optimal oleh masyarakat yang hanya dimanfaatkan untuk keperluan tertentu saja seperti mengirimkan surat lamaran pekerjaan, membayar pajak dan rekening tagihan.

Kata Kunci : Otonomi daerah, Industri pariwisata, Faktor determinan, Aspek ekonomi, Aspek sosial, Aspek komunikasi, Pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah bertujuan untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban dan tidak perlu menangani urusan domestik. Pemerintah pusat lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis (Haris dalam Aryani dan Indarti, 2010). Di lain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan dan digunakan sebagai dasar

kebijakan otonomi daerah, serta dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki yang salah satunya adalah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata dewasa ini diyakini mampu mendorong perekonomian baik secara global maupun lokal dimana dapat meningkatkan devisa, pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat setempat (Soebagyo, 2012). Pengembangan sektor pariwisata perlu didukung oleh berbagai pihak seperti perangkat

pemerintahan di daerah, masyarakat lokal, pelaku bisnis dan juga akademisi yang dapat disinergikan menjadi pendorong keberhasilan pengembangan pariwisata (Wardani, 2013). Tentunya hal tersebut berimplikasi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi baik makro maupun mikro, karena melalui program pengembangan pariwisata ini maka diharapkan kesejahteraan masyarakat dan potensi penerimaan pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Industri pariwisata sangat ditentukan oleh ketercapaian standar pelaksanaan kegiatan yang mana akan berdampak pada keberhasilan program kerja sebuah entitas. Menurut Mawikere (2010), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja pariwisata yaitu komunikasi, sumber daya yang dimiliki dan struktur organisasi. Hal yang sama dijelaskan oleh Soebagyo (2012) bahwa pada hakekatnya ada empat bidang pokok pengembangan pariwisata yaitu ekonomi (sumber devisa dan pajak), sosial (ketersediaan lapangan pekerjaan), budaya (kebudayaan lokal) dan juga lingkungan hidup (sumber daya alam). Pendapat senada dijelaskan Suartini dan Utama (2010) dimana beberapa sumber ekonomis yaitu pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pemungutan pajak yang dimaksud sehingga para

investor lebih berpartisipasi aktif dalam program pembangunan daerah.

Soebagyo (2012) menegaskan bahwa pariwisata dapat dikembangkan melalui beberapa cara yang dirasa belum menjadi perhatian serius dari pihak pengelola maupun pemerintah sebagai pemegang otoritas. Beberapa strategi pengembangan yang dimaksud adalah masalah regulasi pemerintah daerah, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, komunikasi intensif dengan wisatawan potensial tentang program image daerah tujuan wisata, serta tata kelola dan kerjasama pemerintah dan swasta yang masih lemah terkait sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada dasarnya memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak karena terdiri dari banyak pulau sehingga potensi wisata bahari dapat dikatakan sangat tinggi. Potensi industri pariwisata ini dapat dikembangkan dengan baik sehingga diharapkan berdampak pada PAD daerah. Tidak hanya itu potensi sumber PAD juga sangat baik karena potensi pajak yang dimiliki belum dimaksimalkan dengan baik yang berasal dari pajak-pajak daerah seperti pajak hotel. Artinya bahwa potensi sumber PAD NTT belum sepenuhnya dikelola dengan baik sehingga PAD yang nantinya dibagikan ke kas daerah dalam bentuk APBD belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rakyat.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode 2008 – 2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
PAD NTT	553,80	610,17	686,57	862,34	948,34

Sumber : Kemenkeu RI, Dirjen Perimbangan Keuangan, Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. NTT

Pariwisata dan Industri Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya (Nugratama dan Pebriani, 2013). Mar-

paung dalam Suartini dan Utama (2012) mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Dari beberapa definisi pariwisata tersebut maka perkembangan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indikator pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan baik



wisatawan domestik maupun wisatawan asing dan juga indikator pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan PHR yang mempunyai kaitan langsung dengan wisatawan.

Pengertian industri pariwisata disini lebih cenderung memberikan pengertian bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan oleh para wisatawan (Arlina, 2013). Industri pariwisata juga diartikan *"Tourism enterprises are all business entities which, by combining various means of production, provide goods and services of a specially tourist nature"*. Maksudnya industri pariwisata adalah semua kegiatan usaha yang terdiri dari bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para wisatawan (Hunzieker, Yoeti dalam Arlina, 2013).

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang menyediakan barang maupun jasa yang diperuntukkan bagi pariwisata yang meliputi sarana dan prasarana penunjang, kekayaan alam, jasa perseorangan maupun pemerintah, perantara seperti perdagangan serta agen perjalanan, maka sektor pariwisata sering disebut industri pariwisata (Bull dalam Suartini dan Utama, 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Simanjuntak dalam Aryanti dan Indarti, 2010), sedangkan berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan, menggali dan mengelola sumberdaya yang dimiliki agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga untuk mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sehingga kemandirian daerah dapat terwujud (Suartini dan Utama, 2012).

Penelitian yang dilakukan Aryanti dan Indarti (2010) menemukan bahwa variabel produk domestik bruto regional (PDBR) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal tersebut dikarenakan cara penetapan tarif pajak yang kurang tepat. Suartini dan Utama (2012) dalam penelitian mereka menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan dan PHR secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Diantara ketiga variabel tersebut, yang paling dominan berpengaruh terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Mawikere (2010) dan Rantetandung (2012) menemukan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja pariwisata yaitu komunikasi (promosi dan layanan informasi kepariwisataan), sumberdaya manusia (pendidikan dan keahlian) yang dimiliki dan struktur organisasi (kebijakan pemerintah daerah). Hal yang sama dijelaskan oleh Soebagyo (2012) bahwa pada hakekatnya ada empat bidang pokok pengembangan pariwisata yaitu ekonomi (sumber devisa dan pajak), sosial (ketersediaan lapangan pekerjaan), budaya (kebudayaan lokal) dan juga lingkungan hidup (sumber daya alam).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan obyek penelitian adalah faktor determinan industri pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPS Prov. NTT; *e-gov* pemerintah daerah terkait) maupun peraturan perundang-undangan pemerintah daerah setempat serta informasi dan data yang berasal dari artikel/kajian teoritis maupun empiris terkait tujuan penelitian.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dimana penelitian ditujukan untuk memper-

oleh penjelasan yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedangkan proses analisis data dengan pendekatan *action research* dimana semua pihak (masyarakat, peneliti, dan pemerintah daerah) saling terlibat dari awal hingga akhir dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata.

Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel yang diadopsi dari penelitian Mawikere (2010) dan Soebagyo (2012) yaitu aspek ekonomi (pendapatan pajak-PPJK), aspek sosial (ketersediaan lapangan pekerjaan-LPEK), dan aspek komunikasi publik (jumlah kantor pos-POST). Teknik analisa data menggunakan metode induktif, yaitu dimulai dari deskripsi, analisis, dan penjelasan. Data yang didapatkan dari keseluruhan proses penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif kualitatif mengenai perencanaan dan pengembangan pariwisata. Model penelitian ini menggunakan model regresi berganda dan untuk memudahkan proses analisa peneliti menggunakan bantuan *software* SPSS v.16. berikut model analisa yang digunakan dalam penelitian ini.

$$PAD = a + b_1PPJK + b_2LPEK + b_3POSTELP + e, \text{ dimana :}$$

PAD = Pendapatan Asli Daerah Prov. NTT (PAD NTT)

PPJK = jumlah pendapatan pajak (aspek ekonomi)

LPEK = jumlah lapangan pekerjaan (aspek sosial)

POSTELP = jumlah kantor pos dan sambungan telepon (aspek komunikasi)

b1, b2, b3 = parameter pengukuran variabel

e = error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dengan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Progresitas PAD tersebut ditunjang pula dengan peningkatan Pendapatan Pajak (PPJK) yang linier dengan PAD. Artinya bahwa PPJK daerah NTT sebagai salah satu kontributor

terhadap PAD keseluruhan provinsi NTT mampu memberikan peran besar terhadap besaran realisasi PAD daerah. Dengan demikian maka PPJK perlu memperoleh perhatian besar dari pemerintah setempat untuk dapat lebih ditingkatkan.

Tabel 2. Data Variabel Penelitian
(dalam .000.000, kecuali POST)

Tahun	PAD	PPJK	LPEK	POST
2008	553.800	146.066,339	2,086	104
2009	610.170	165.154,627	2,161	104
2010	686.570	195.002,625	2,062	109
2011	862.340	266.844,748	2,097	109
2012	948.340	314.952,559	2,096	109

Sumber : Kemenkeu RI, Dirjen Perimbangan Keuangan, Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. NTT; www.bpsntt.go.id, olahan peneliti

Berbeda dengan PPJK dan PAD, Lapangan Pekerjaan (LPEK) yang mampu disediakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov. NTT) belum mampu menunjukkan konsistensi terhadap kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan yang menjadi dasar sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebagian besar lapangan pekerjaan yang tersedia didominasi oleh bidang informal seperti pertanian, peternakan, perikanan dan lapangan pekerjaan lain yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mempertimbangkan mengenai strategi perluasan lapangan kerja yang diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kesejahteraan dan pendapatan masyarakat maupun pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Strategi yang dimaksud antara lain dengan pemberdayaan masyarakat kecil dalam kegiatan pembangunan daerah sehingga masyarakat juga mendapatkan dampak ekonomi yang memadai. Disamping itu pemerintah juga dapat menyalurkan dana kredit bergulir melalui kerjasama dengan pihak perbankan yang pada gilirannya diharapkan akan

mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Jumlah kantor pos (POST) sebagai salah satu perangkat penyampai informasi dan komunikasi kepada masyarakat belum menjadi perhatian pemerintah untuk dapat dioptimalkan. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi yang sangat cepat mendorong masyarakat lebih menggunakan alat komunikasi informasi yang lebih canggih seperti halnya telepon genggam, fasilitas pesan singkat, dan juga fitur-fitur canggih lain yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mempercepat mobilitas mereka. Dengan demikian peran kantor pos masih dirasa sangat dibutuhkan ketika sebagian kecil masyarakat masih menggunakan jasa kantor pos untuk memenuhi kebutuhan mereka terutama masyarakat yang berada pada geografis daerah yang relatif belum terjangkau oleh teknologi seperti di pedesaan maupun perkampungan yang jauh dari kota. Hal ini juga berdampak pada penguasaan teknologi yang jauh dari harapan. Jumlah kantor pos yang belum memadai dibanding dengan jumlah penduduk dirasa masih kurang memadai karena perkembangan jumlah keberadaan kantor pos sendiri belum berkembang dengan baik. Hal tersebut dimungkinkan karena kebutuhan anggaran yang jauh dari kemampuan kontribusi pendapatan bagi daerah itu sendiri.

Tabel 3. Ringkasan Uji Asumsi Klasik Variabel Bebas

Variabel Bebas		
Pengujian Multikolonieritas	Tolerance	VIF
Pendapatan Pajak (PPJK)	0,254	3,944
Lapangan Pekerjaan (LPEK)	0,461	2,169
Kantor Pos (POST)	0,175	5,699
Pengujian Heteroskedastisitas (Glejser test)	sign. t-test	
Pendapatan Pajak (PPJK)	0,883	
Lapangan Pekerjaan (LPEK)	0,882	
Kantor Pos (POST)	0,714	
Pengujian Autokorelasi		
Durbin - Watson test	2,965	
Pengujian Normalitas Resi dual		
Kolmogorov - Smirnov test	0,953	
Variabel Terikat: Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
N = 5		

Sumber : Data dicilah

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, artinya bahwa data dapat terus digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel ringkasan pengujian asumsi klasik, normalitas data ditunjukkan dengan nilai signifikansi K-S test sebesar 0,953 maka data bersifat normal. Uji heteroskedastisitas dengan uji glejser juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel bebas (PPJK=0,883; LPEK=0,882; POST=0,714) menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi juga menunjukkan hasil yang baik dimana pengujian Durbin-Watson menunjukkan nilai DW-test sebesar 2,965 menunjukkan nilai yang besar dari tabel sehingga dapat dikatakan bahwa pada pengujian hipotesis yang diajukan tidak terdapat autokorelasi. Pengujian asumsi klasik yang terakhir menunjukkan nilai multikolinearitas yang baik dimana nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) (PPJK=3,994; LPEK=2,169; POST=5,699) yang menjadi salah satu indikator pengujian bernilai kurang dari 10 yang artinya bahwa pengujian hipotesis ini tidak terjadi hubungan antar variabel bebas yang diuji.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas yang digunakan dalam model, hanya variabel pendapatan pajak yang memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (koef=2.117; t-test=12.072; sign=0.053). Hal ini menjelaskan bahwa PPJK memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD NTT. Peningkatan PAD tersebut disebabkan adanya peningkatan PPJK yang linier. Artinya bahwa PPJK daerah NTT sebagai salah satu kontributor terhadap PAD keseluruhan Provinsi NTT mampu memberikan peran besar terhadap besaran realisasi PAD daerah. Dengan demikian maka PPJK perlu memperoleh perhatian besar dari pemerintah setempat untuk dapat lebih ditingkatkan. Potensi pajak yang masih cukup memadai hendaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah karena dengan sendirinya jika pendapatan daerah dari sektor pajak meningkat akan meningkatkan pula PAD Pemprov. NTT.

Tabel 4. Ringkasan Pengujian Hipotesis Penelitian

Variabel Penelitian	Hipotesis Penelitian		
	Koef.	t-test	sign
Constant	-1.192	-1.183	.447
PPJK	2.117	12.072	.053
LPEK	268599.823	1.064	.480
POST	8406.548	1.534	.368
Adj R square	0.994		
F stat	236.685		.048

Sumber : data diolah

Namun demikian berbeda dengan PPJK, hasil pengujian menjelaskan bahwa ternyata LPEK tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap PAD (koef=268599.823; t-test=1.064; sign=0.480). Hal ini menandakan bahwa jumlah LPEK yang ada tidak mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Penjelasan adalah bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi NTT belum mampu memberikan tambahan PAD karena sektor pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat mayoritas terbesar masih pada sektor informal yang lebih lebih pada pemenuhan kebutuhan sendiri/keluarga seperti pertanian dan perkebunan rakyat, perikanan, serta peternakan. Sedangkan sektor formal yang mana memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak dan asli daerah semisal bidang jasa, transportasi, perdagangan sampai pada pegawai negeri sipil relatif masih terlalu kecil sehingga tidak berdampak langsung terhadap PAD yang dimaksud. Strategi lainnya antara lain dengan pemberdayaan masyarakat kecil dalam kegiatan pembangunan daerah sehingga masyarakat juga mendapatkan dampak ekonomi yang memadai. Pemerintah juga dapat menyalurkan dana kredit bergulir melalui kerjasama dengan pihak perbankan yang pada gilirannya diharapkan akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bersumber dari masyarakat itu sendiri serta peningkatan pajak yang bersumber dari pendapatan masyarakat yang meningkat.

Sama halnya dengan LPEK, POST juga memiliki pengaruh yang kecil terhadap PAD (koef=8406.548; t-test=1.534; sign=0.368). Hal ini menandakan bahwa jumlah kantor pos tidak berdampak langsung terhadap peningkatan PAD. Penjelasan yang dapat diberikan adalah bahwa koefisien yang dihasilkan dimungkinkan karena kantor pos yang ada tidak digunakan secara optimal oleh masyarakat. Masyarakat hanya menggunakan jasa kantor pos untuk keperluan-keperluan tertentu saja semisal mengirimkan surat lamaran pekerjaan, membayar pajak dan rekening, sedangkan untuk keperluan komunikasi masyarakat telah lebih banyak memanfaatkan teknologi komunikasi untuk berkomunikasi semisal telepon jarak dekat (lokal) maupun jarak jauh (interlokal dan internasional). Kebanyakan fungsi POST hanya digunakan oleh masyarakat pedesaan yang mana pada kawasan-kawasan tersebut belum banyak yang memahami penggunaan teknologi yang memadai maupun jangkauan telekomunikasi nirkabel yang tidak memadai.

Secara umum hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mawikere (2010), Rantetandung (2012) dan Soebagyo (2012) dimana aspek ekonomi yang diukur dengan PPJK, aspek sosial yang diwakili LPEK dan aspek komunikasi dengan pengukuran POST memberi dampak positif dan mempengaruhi terhadap PAD, akan tetapi hubungan yang terjadi sangat bervariasi dimana PPJK memiliki pengaruh terbesar dan signifikan terhadap PAD, sedangkan LPEK dan POST tidak signifikan. Artinya bahwa PPJK sebagai salah satu aspek ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu landasan pengambilan keputusan terkait PAD Pemprov. NTT. Berbeda dengan PPJK, variabel LPEK dan POST sebagai aspek sosial dan aspek komunikasi masih perlu mendapat perhatian serius karena bagaimanapun juga aspek sosial dan komunikasi memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah maupun negara, dimana jika masyarakat sebagai aspek sosial terbesar perlu difasilitasi dengan aspek komunikasi yang memadai karena dengan komunikasi

yang memadai maka hubungan sosial antara masyarakat akan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dapat di jelaskan bahwa variabel PPJK sebagai aspek ekonomi pemerintah memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap peningkatan PAD (koef=2.117; t-test=12.072; sign=0.053). Hal ini menjelaskan bahwa PPJK mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD NTT. Peningkatan PAD tersebut disebabkan peningkatan PPJK yang linier. Variabel LPEK sebagai aspek sosial memiliki pengaruh positif yang lemah terhadap PAD (koef=268599.823; t-test=1.064; sign=0.480). Hal ini menandakan bahwa LPEK belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD yang dikarenakan sektor pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat mayoritas masih berada pada sektor informal seperti pertanian dan perkebunan rakyat, perikanan, serta peternakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri/ keluarga. Variabel POST sebagai aspek komunikasi memiliki pengaruh positif yang lemah terhadap PAD (koef=8406.548; t-test=1.534; sign=0.368). Hal ini menandakan bahwa jumlah kantor pos tidak berdampak langsung terhadap peningkatan PAD. Penjelasan dimungkinkan karena kantor pos yang ada belum digunakan secara optimal oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan jasa kantor pos hanya untuk keperluan tertentu saja seperti mengirimkan surat lamaran pekerjaan, membayar pajak dan rekening.

Saran

Oleh karena itu saran dalam penelitian ini adalah PPJK sebagai salah satu kontributor terhadap PAD perlu memperoleh perhatian besar dari Pemprov. NTT untuk dapat lebih ditingkatkan lagi. Potensi pajak yang masih cukup memadai hendaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah karena dengan sendirinya jika pendapatan daerah dari sektor pajak

meningkat akan meningkatkan pula PAD Pemprov. NTT. Terkait variabel LPEK, strategi yang dapat dikembangkan oleh Pemprov. NTT antara lain pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Penyaluran dana kredit bergulir melalui kerjasama dengan pihak perbankan pada gilirannya diharapkan akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan potensi pajak yang bersumber dari pendapatan masyarakat. Optimalisasi POST dalam mendukung peningkatan PAD perlu menjadi perhatian Pemprov. NTT dengan cara peningkatan fungsi kantor pos sebagai salah satu penyampai informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat tetap menggunakan jasa pos tersebut yang pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina, R., 2013, *Analisis Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata Di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Skripsi, FEB-Universitas Diponegoro Semarang.
- Aryani, E., dan Indarti, I., 2010, *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang*, Working Paper, STIE Widya Manggala.
- Badan Pusat Statistik Pusat, www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, www.nttbps.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012, *Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, sumber : www.google.com diunduh tanggal 24 Mei 2014.



- Mawikere, G. M., 2010, *Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Propinsi Sulawesi Utara*, Sumber : www.google.com diunduh tanggal 1 April 2014.
- Nugratama, S., dan Pebriani, D., 2013, *Faktor Penghambat Perkembangan Obyek Wisata Taman Buaya di Kabupaten Bekasi*, Jurnal REGION Vol. 5, No. 1.
- Rantetandung, M., 2012, *Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah Dan Kunjungan Wisatawan Terhadap PAD di Kabupaten Nabire*, Jurnal Agroforestri Vol. VII, No. 2, ISSN. 1907-7556.
- Soebagyo, 2012, *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia*, Jurnal Liquidity Vol. 1, No. 2, hlm. 153-158.
- Suartini, N. N., dan Utama, M. S., 2012, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar*, Working Paper, FE-Universitas Udayana, Bali.
- Surya, I. B. K., 2006, *Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Pertanian Dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Provinsi Bali*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Wardani, R. Y., 2013, *Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang*, Jurnal Ratika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.